



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI INFORMASI PUSAT
UNIT KERJA : KOMISIONER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAMROHTUN NAJAH**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **876092**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.893.158.279
1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.800.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/65 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 725.000.000		
3. Bangunan Seluas 40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/70 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.168.158.279		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	225.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	55.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	6.430.740
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.771.790
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.191.160.809
III. HUTANG	Rp.	99.404.141
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.091.756.668

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.